

**DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH) DI INSTAGRAM
SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

(Tugas Akhir)

**Oleh
Fitri Nur Setiawati
2306071022**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA HUBUNGAN MASYARAKAT
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

ABSTRAK

DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH) DI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Fitri Nur Setiawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses dokumentasi kegiatan pimpinan daerah hingga dipublikasikan melalui Instagram Pemerintah Provinsi Lampung (@pemprovlampung_) serta mengetahui respons masyarakat terhadap dokumentasi kegiatan pimpinan daerah yang disampaikan melalui media sosial tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses dokumentasi kegiatan pimpinan daerah telah menerapkan fungsi manajemen POAC (*Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling*) melalui tahapan identifikasi kegiatan, peliputan, pengelolaan konten, *review*, hingga publikasi melalui fitur *feed* dan *reels* Instagram. Dokumentasi kegiatan pimpinan daerah terbagi ke dalam lima tema utama yang dianalisis, yaitu program dan kebijakan pemerintah daerah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, isu sosial atau lingkungan, dan kegiatan seremonial. Selain itu, respons masyarakat menunjukkan adanya keterlibatan publik melalui suka, komentar, berbagi, dan tayangan, terutama pada konten yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa Instagram Pemerintah Provinsi Lampung berperan sebagai media komunikasi publik yang mendukung transparansi informasi dan partisipasi masyarakat di era digital.

Kata Kunci: Dokumentasi Kegiatan, Instagram, Komunikasi Publik, Media Sosial Pemerintah, Transparansi Informasi Publik,

ABSTRACT

DOCUMENTATION OF ACTIVITIES BY PROVINCIAL LEADERS (GOVERNOR, VICE GOVERNOR, AND PROVINCIAL SECRETARY) ON INSTAGRAM AS A MEDIUM FOR TRANSPARENCY IN INFORMATION FROM THE LAMPUNG PROVINCIAL GOVERNMENT

By

Fitri Nur Setiawati

The study aims to examine the process of documenting regional leaders' activities until their publication on the Lampung Provincial Government's Instagram account (@pemprovlampung_) and to assess public response to the documentation of these activities shared via this social media platform. This study employs a qualitative descriptive method with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. The results indicate that the documentation process for local government leaders' activities has implemented the POAC management functions (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling) through the stages of activity identification, coverage, content management, review, and publication via Instagram's feed and Reels features. Documentation of local leaders' activities was divided into five main themes for analysis: local government programs and policies, infrastructure development, public services, social or environmental issues, and ceremonial events. Additionally, public responses indicated public engagement through likes, comments, shares, and views, particularly for content directly related to the public's interests. This study indicates that the Lampung Provincial Government's Instagram account serves as a public communication platform that supports information transparency and public participation in the digital age.

Keywords: *Activity Documentation, Instagram, Public Communication, Government Social Media, Public Information Transparency.*

**DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR,
WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH) DI INSTAGRAM
SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI INFORMASI
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Oleh

Fitri Nur Setiawati

Tugas Akhir

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar

AHLI MADYA (A.Md)

Pada

Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir : **DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH) DI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Fitri Nur Setiawati**

Nomor Induk Mahasiswa : **2306071022**

Program Studi : **Diploma III Hubungan Masyarakat**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.

NIP. 197507152008122003

2. Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat

Dr. Ibrahim Besar S.Sos., M.Si.

NIP. 196803212002121001

MENGESAHKAN

1. **Tim Penguji**

Ketua : Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si.

Penguji : Eka Yuda Gunawibawa, S.I.Kom., M.Med.Kom.

2. **Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Tugas Akhir : 10 Juni 2026

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitri Nur Setiawati

NPM : 2306071022

Program Studi : Diploma III Hubungan Masyarakat

Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Waluh2, No.33, Kemiling Kota Bandar
Lampung,

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir yang berjudul **“DOKUMENTASI KEGIATAN PIMPINAN DAERAH (GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR, DAN SEKRETARIS DAERAH) DI INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA TRANSPARANSI INFORMASI PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG”** adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau dibuatkan orang lain. Apabila di kemudian hari hasil Tugas Akhir saya ada pihak lain yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap dicabut gelar akademik saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dalam keadaan sadar, dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



Fitri Nur Setiawati

NPM. 2306071022

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Fitri Nur Setiawati dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 02 November 2005. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Suharsono dan Ibu Miskiah.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2017. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 26 Bandar

Lampung yang diselesaikan pada tahun 2020. Dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 14 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2023.

Pada tahun 2023 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalui Jalur SNBT. Selama menempuh dunia pendidikan di bangku kuliah, penulis aktif dalam mengikuti organisasi, yaitu Himpunan Mahasiswa Diploma Universitas Lampung (HMD Humas Unila) serta penulis dipercaya untuk bertanggung jawab menjadi Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Periode 2024/2025. Dan pada akhir perkuliahan, penulis melaksanakan magang di Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Bagian Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung selama 40 hari yang dimulai pada tanggal 5 Januari 2026 sampai 3 Maret 2026.

MOTTO

“Pilihlah tempat di mana kamu menjadi lebih baik, karena jika kamu salah pilih,
kamu akan menjadi bagian dari mereka.”

(Penulis)

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka
mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(Q.S Ar-Ra'd: 11)

PERSEMBAHAN

Yang Utama Dari Segalanya

Alhamdulillahirobbil'alamin teriringi rasa syukurku kepada sang pencipta Allah SWT yang selalu mengiringi perjalanan hidupku dan mempermudah segala urusanku serta Nabi Muhammad SAW yang selalu melimpahkan nikmat dan karunianya serta kebahagiaan sebagai setiap umatnya.

Kupersembahkan Karya Kecilku ini untuk :

My Lovely Parents

Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Suharsono dan pintu surgaku Ibunda Miskiah. Terima kasih atas segala yang kalian berikan, membesarkan dan merawat dengan tulus tanpa adanya keluhan kesah, do'a yang tidak pernah terputus, serta kasih sayang yang begitu hangat yang kalian berikan. Kalian adalah alasan terbesarku untuk bisa bermimpi dan berjuang. Bismillah usahaku ini dapat menjadikan kebanggaan kecil bagi kalian di besarnya pengorbanan yang telah kalian limpahkan dihidupku. Terima kasih atas segala yang kalian berikan, pengorbanan dan tulus kasih sangat berarti bagi hidupku.

My Older Brother, My Older Sister, and My Nephew

Teruntuk kakak-ku Jaka Setiawan, Meilanto Setiadi dan Desti Fitriani. Terima kasih atas dukungan yang telah kalian berikan selama penulis masih ada didekat kalian. Do'a serta tulus sayang kalian kepadaku, bismillah kalian bahagia selalu dan dilimpahkan nikmat apapun. Dan keponakanku terima kasih telah hadir dibagian hidupku dengan canda tawamu yang begitu ceria. Bismillah hidupmu akan senantiasa mudah dan selalu dilindungan Allah SWT.

SANWACANA

Bismillahirrahmannirrahim

Assalamu 'alaikum warahmatulahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “**Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah) di Instagram Sebagai Media Transparansi Informasi Pemerintah Provinsi Lampung**”. Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat dalam program studi Diploma III Hubungan Masyarakat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Shalawat serta salam tak lupa senantiasa penulis ucapkan kepada *Rasulullah* Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik bagi manusia.

Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran, nasihat, bimbingan serta data dan informasi dari berbagai pihak. Sebelumnya penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak yang telah banyak mendukung. Dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Lusmeila Afriani, D.E.A.,IPM.,ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Dr. Ibrahim Besar, S.Sos.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat Universitas Lampung.
4. Dr. Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, waktu, tenaga, pikiran dan arahan yang telah membantu saya dalam menyusun tugas akhir dengan penuh kesabaran. Bismillah semoga Allah SWT senantiasa selalu melindungi Dr. Wulan Suciska, S.Ikom., M.Si., dan keluarga.
5. Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan, dedikasi, arahan,

membantu dalam tugas akhir saya dengan penuh kesabaran, telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran serta saran dan masukan yang telah diberikan. Bismillah semoga Allah SWT selalu melindungi dan merahmati Dr. Nanda Utaridah, S.Sos., M.Si. dan keluarga.

6. Seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
7. Seluruh staf dan karyawan Program Studi Diploma III Hubungan Masyarakat.
8. Kepada Mba Iis, Bapak Dedi, dan Mba Nisa Selaku Operator Diploma III Hubungan Masyarakat yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
9. Kasubbag Dokumentasi Pimpinan (bang anggy), Mba-mba dan Abang-abang Dokpim (Mba Gits, Mba Win, Bang Yud, Bang Gils, Bang Risz, Bang Tiyo, Yay Piqri, Bang Peb, Bang Rezs, Bang Saca, Bang Sam, Bung, Bang Arip, Bang Rehan) yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di Biro Administrasi Pimpinan khususnya bagian Dokumentasi Pimpinan, serta memberikan canda tawa dan kehangatan.
10. Teman-teman Perempuan Penghuni Surga, yaitu Syafitri, Rantika, Mutiara, dan Vingga yang telah menjadi tempat untuk bersenang-senang, rumah, keluarga sekaligus cerita keluh kesah penulis.
11. Teman-teman F3, yaitu Delia dan Fera yang telah menjadi salah satu manusia seperjuangan dari masa sekolah pertama hingga saat ini, sekaligus tempat berkeluh kesah dalam hidup penulis.
12. Teman-teman Otw Magang, yaitu Rifal, Inasya, dan Zahrah yang telah menjadi teman seperjuangan dalam melaksanakan magang, sekaligus teman bersenang-senang sehingga magang tidak terasa berat.
13. Teman di Fakultas Sebelah yang telah menjadi tempat bercerita juga.
14. Teman-teman seperjuangan Humas 2023 Jurusan Diploma III Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Terima kasih untuk kebersamaan, dukungan, dan canda

tawanya.

15. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan dan tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan Tugas Akhir ini, semua ini merupakan pencapaian yang luar biasa dalam hidup penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru untuk kita semua.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh...

Bandar Lampung, 10 Juni 2026

Hormat saya,

Fitri Nur Setiawati

NPM. 230607102

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
LEMBAR PENGESAHAN	v
MENGESAHKAN.....	vi
PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
1.5 Metode Pengumpulan Data	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Transparansi Informasi Publik	7
2.1.1 Pengertian Transparansi.....	7
2.1.2 Prinsip Transparansi	8
2.1.3 Indikator Transparansi Informasi Publik	8
2.1.4 Transparansi Digital.....	9
2.2 Komunikasi Publik.....	10
2.2.1 Pengertian Komunikasi Publik	10
2.2.2 Fungsi Komunikasi Publik.....	11
2.2.3 Komunikasi Publik Melalui Media Sosial (Instagram)	12
2.3 Media Sosial dalam Komunikasi Publik	12

2.3.1 Pengertian Media Sosial	12
2.3.2 Karakteristik Media Sosial.....	13
2.3.3 Fungsi Media Sosial dalam Komunikasi Publik.....	14
2.3.4 Media Sosial dalam Konteks Pemerintahan Digital	14
2.4 Instagram sebagai Media Komunikasi Publik Pemerintah.....	15
2.4.1 Pengertian dan Karakteristik Instagram dalam Komunikasi Publik Pemerintah	15
2.4.2 Fungsi Instagram dalam Komunikasi Pemerintah	16
2.4.3 Instagram sebagai Media Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	17
2.5 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	18
2.5.1 Pengertian Dokumentasi dalam Konteks Pemerintahan	18
2.5.2 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan sebagai Komunikasi Publik	18
2.5.3 Proses Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	19
2.5.4 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan sebagai Media Informasi Publik	20
2.5.5 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Transparansi Informasi Publik	21
2.6 Pendekatan POAC	22
2.6.1 Pengertian POAC.....	22
2.6.2 Planning (Perencanaan)	23
2.6.3 Organizing	23
2.6.4 Actuating (Pelaksanaan)	24
2.6.5 Controlling (Pengawasan).....	25
BAB III GAMBARAN UMUM	26
3.1 Gambaran Umum Instansi	26
3.1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Lampung.....	26
3.1.2 Logo Pemerintah Provinsi Lampung	28
3.1.3 Lokasi Praktik Kerja Lapangan	31
3.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung.....	31
3.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung	32
3.2 Gambaran Sub Instansi.....	33
3.2.1 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung....	33
3.2.2 Visi Misi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.....	35
3.2.3 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Proses Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	39
4.1.2 Respons Masyarakat Terhadap Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah.....	56
4.2 Pembahasan	65
4.2.1 Proses Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah	66
4.2.2 Respons Masyarakat Terhadap Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah.....	75
BAB V PENUTUP.....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Pemerintah Provinsi Lampung.....	28
Gambar 2. Lokasi Biro Administrasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung.....	31
Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung.....	32
Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Adpim Setda Pemprov Lampung	36
Gambar 5. Konten Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	44
Gambar 6. Konten Pembangunan Infrastruktur	47
Gambar 7. Konten Pelayanan Publik	49
Gambar 8. Konten Isu Sosial/Lingkungan	52
Gambar 9. Konten Publikasi Kegiatan Seremonial	55
Gambar 10. Proses Planning	67
Gambar 11. Proses Organizing.....	70
Gambar 12. Proses Actuating.....	71
Gambar 13. Proses Controlling.....	72
Gambar 14. Wawancara dengan Kasubbag: Anggy Irfan Syaputra, S.STP., M.AP (Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada 24 April 2026).....	100
Gambar 15. Wawancara dengan Staf Dokumentasi Pimpinan: Bang Gilang (Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada 24 April 2026).....	100
Gambar 16. Wawancara dengan Staf Dokumentasi Pimpinan: Bang Yudhistira (Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada 24 April 2026).....	101
Gambar 17. Wawancara dengan Staf Dokumentasi Pimpinan: Bang Tiyo (Sumber: Dokumentasi Pribadi Pada 29 April 2026).....	101

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Media Sosial Pemerintah Provinsi Lampung	36
Tabel 2. Klasifikasi Analisis Konten	39
Tabel 3. Analisis Konten Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	41
Tabel 4. Analisis Konten Pembangunan Infrastruktur	43
Tabel 5. Analisis Konten Pelayanan Publik	45
Tabel 6. Analisis Konten Isu Sosial/Lingkungan	47
Tabel 7. Analisis Konten Publikasi Kegiatan Seremonial	49
Tabel 8. Analisis Respons Masyarakat Terhadap Konten Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	52
Tabel 9. Analisis Respons Masyarakat Terhadap Konten Pembangunan Infrastruktur	53
Tabel 10. Analisis Respons Masyarakat Terhadap Konten Pelayanan Publik	55
Tabel 11. Analisis Respons Masyarakat Terhadap Konten Isu Sosial atau Lingkungan	57
Tabel 12. Analisis Respons Masyarakat Terhadap Konten Kegiatan Publikasi Seremonial	58

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, setiap pekerjaan pimpinan daerah tidak terlepas dari proses dokumentasi sebagai bagian dari penyampaian informasi kepada masyarakat. Dokumentasi memiliki peran penting dalam merekam, mengelola, dan menyebarkan informasi mengenai aktivitas pemerintah kepada masyarakat. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, dokumentasi menjadi alat komunikasi yang mendukung keterbukaan informasi pemerintah kepada masyarakat dan bukan hanya arsip administratif (Maulvi, Rizal, & Lusiana, 2023), penyebaran informasi tersebut tidak lagi terbatas oleh media konvensional melainkan beralih ke media sosial yang mampu menjangkau audiens secara luas.

Dalam konteks pemerintahan daerah, dokumentasi kegiatan pimpinan yang meliputi Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah berperan sebagai media komunikasi publik yang menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka. Melalui proses peliputan, pengemasan konten, dan publikasi konten, dokumentasi kegiatan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas pemerintahan, pelaksanaan program, serta berbagai kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, dokumentasi memiliki peran penting dalam mendukung transparansi informasi publik.

Transparansi informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi memungkinkan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara terbuka, jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan (Saputro, Gunawan, & Zulkarnain, 2022; Sumantri, 2023). Keterbukaan informasi sangat penting karena masyarakat berhak untuk mengetahui berbagai tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam era digital,

transparansi tidak hanya diwujudkan melalui penyediaan dokumen resmi pemerintah, tetapi juga melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi yang lebih cepat, luas, dan mudah diakses oleh masyarakat (Mulyadi, 2025; Wulandar, Aprilla, & Elcaputera, 2024).

Dalam mendukung penyebaran dokumentasi kegiatan pimpinan, pemerintah daerah memanfaatkan berbagai media komunikasi digital, salah satunya media sosial Instagram, yang memungkinkan publikasi dokumentasi kegiatan pimpinan dalam bentuk foto dan video. Hal ini memungkinkan informasi disampaikan secara visual, cepat, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Instagram dapat membantu menyebarkan berita karena banyaknya pengguna media sosial di Indonesia (DataReportal, 2024). Namun demikian, Instagram diposisikan sebagai media publikasi yang digunakan untuk mencatat kegiatan pimpinan daripada sebagai subjek utama penelitian.

Pemerintah Provinsi Lampung menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Hal tersebut terlihat dari capaian Pemerintah Provinsi Lampung yang memperoleh kategori kualitas tertinggi dalam penilaian pelayanan publik tahun 2025 (Ombudsman Republik Indonesia, 2024; Pemerintah Provinsi Lampung, 2025). Capaian tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Meskipun demikian, peningkatan kinerja tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh peningkatan pengetahuan publik tentang transparansi pemerintah. Berdasarkan pengamatan selama melaksanakan kegiatan magang di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, masih ditemukan pandangan masyarakat yang menganggap publikasi kegiatan pimpinan daerah di media sosial hanya menampilkan aktivitas seremonial dan belum sepenuhnya menjelaskan substansi kebijakan dan keuntungan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara bagaimana masyarakat melihat informasi yang diberikan pemerintah sebagai transparan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk melihat sejauh mana dokumentasi kegiatan

pimpinan daerah mampu berfungsi sebagai media transparansi informasi publik.

Dari segi regulasi, Pemerintah Provinsi Lampung telah memiliki dasar hukum untuk pengelolaan informasi dan dokumentasi publik melalui kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor 225 Tahun 2016, kebijakan tersebut menetapkan bahwa pemerintah daerah bertanggung jawab untuk menyediakan informasi yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa transparansi informasi merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam mendorong transparansi informasi publik. Persia dan Chariuni (2024) menemukan bahwa media sosial dapat mendorong transparansi informasi publik, meskipun menghadirkan tantangan dalam pengelolaan komunikasi digital. Haryadi (2024) menegaskan bahwa media sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi publik. Sementara oleh Havifi et al. (2023) menjelaskan pentingnya komunikasi pemerintah dalam menjembatani informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada pemanfaatan media sosial, komunikasi publik, dan transparansi informasi pemerintah secara keseluruhan. Penelitian yang secara khusus mengkaji dokumentasi kegiatan gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah sebagai media transparansi informasi publik masih relatif terbatas, terutama di tingkat pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara dokumentasi kegiatan pimpinan daerah digunakan untuk meningkatkan transparansi informasi publik di pemerintahan Provinsi Lampung. Hasilnya diharapkan dapat membantu mengembangkan penelitian tentang komunikasi

publik, transparansi informasi publik, dan pengelolaan dokumentasi pemerintahan di era digital.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses dokumentasi kegiatan pimpinan daerah hingga dipublikasikan melalui Instagram Pemerintah Provinsi Lampung?
2. Bagaimana respons masyarakat terhadap dokumentasi kegiatan pimpinan daerah yang disampaikan melalui Instagram?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses dokumentasi kegiatan pimpinan daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, mulai dari tahap peliputan, pengelolaan, hingga publikasi melalui media sosial Instagram.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis respons masyarakat terhadap dokumentasi kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui Instagram.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis adalah manfaat yang dapat digunakan sebagai ilmu untuk pembaca dan manfaat praktis adalah manfaat yang nantinya dapat digunakan oleh pihak perusahaan. Sehingga penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi Biro Administrasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung dalam mengoptimalkan dokumentasi kegiatan pimpinan melalui Instagram. Selain itu, hasil penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi publik, serta bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang lebih jelas, terbuka, dan dapat dipercaya.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang studi komunikasi, khususnya komunikasi publik dan tata kelola digital. Penelitian ini berkontribusi dengan mengkaji peran dokumentasi kegiatan pimpinan sebagai media penyebaran informasi publik melalui media sosial. Selain itu, melengkapi penelitian sebelumnya dengan menyajikan analisis yang kontekstual mengenai transparansi informasi publik di tingkat pemerintah daerah.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Di dalam penulisan Tugas Akhir ini, metode penulisan yang digunakan penulis, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan memberikan penafsiran atau gambaran dari data yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi

Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kegiatan pengelolaan dokumentasi yang berkaitan dengan acara-acara para pimpinan daerah di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung. Pengamatan ini mencakup proses pendokumentasian acara, pengelolaan konten, serta publikasi melalui platform media sosial Instagram. Selain itu, pengamatan ini juga menelaah konten yang dipublikasikan di akun Instagram resmi Pemerintah Provinsi Lampung

untuk menganalisis format, karakteristik, dan pola penyajian informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

2. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya-jawab langsung antara peneliti dan narasumber untuk memperoleh informasi mendalam mengenai suatu topik penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa dokumen tangkapan layar (*screenshot*) konten Instagram yang terdiri atas *feed* dan *reels* yang mencakup isi pesan, tema kegiatan, indikator transparansi informasi publik, serta respons masyarakat terhadap unggahan yang dipublikasikan.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis maupun elektronik yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber tersebut dapat berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, dokumen resmi, serta referensi akademik lainnya yang relevan dengan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Transparansi Informasi Publik

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi merupakan suatu prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintah yang memberikan masyarakat akses untuk mendapatkan informasi publik secara jelas, akurat, dan mudah diakses. Transparansi menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengetahui, memahami, dan mengawasi tindakan pemerintah.

Menurut Saputro, Gunawan, dan Zulkarnain (2022), transparansi merupakan bentuk keterbukaan informasi yang memberikan masyarakat akses terhadap informasi secara jelas dan terbuka sebagai tanggung jawab lembaga kepada publik. Sejalan dengan itu, Komisi Informasi Pusat menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan hak masyarakat dan kewajiban badan publik, dan bahwa badan publik memiliki peran dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan terlibat.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa transparansi mengacu pada keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang akurat, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Transparansi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun kepercayaan publik, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memastikan bahwa tata kelola pemerintahan dijalankan secara terbuka dan bertanggung jawab.

2.1.2 Prinsip Transparansi

Transparansi merupakan salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang menekankan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa informasi tersebut dapat diakses, dipahami, dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada publik.

Menurut Raib, Rosadi, dan Cahyadini (2025) prinsip transparansi menekankan bahwa organisasi atau pemerintah harus menyampaikan informasi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan sehingga masyarakat dapat memahaminya. Sejalan dengan itu, dalam Sari, Previdayana, dan Djasuli (2022) dijelaskan bahwa prinsip transparansi mencakup hal-hal seperti keterbukaan, kejujuran, dan kemudahan akses masyarakat terhadap informasi sebagai bentuk tanggung jawab kepada publik.

Dalam konteks komunikasi publik pemerintah, prinsip transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara terbuka melalui berbagai media komunikasi yang digunakan. Berdasarkan uraian tersebut, prinsip transparansi terdiri dari keterbukaan informasi, kejelasan informasi, kejujuran dalam penyampaian informasi, kemudahan akses informasi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.

2.1.3 Indikator Transparansi Informasi Publik

Transparansi informasi publik dapat dilihat dari sejumlah indikator yang menunjukkan sejauh mana informasi yang disampaikan secara terbuka, jelas, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan informasi tersebut. Menurut Arkarizki, Irawati, dan Sukarno (2023), transparansi informasi publik tercermin dari keterbukaan, kejelasan, dan kemudahan akses terhadap informasi yang disediakan kepada masyarakat. Sementara

itu, Nurimansjah dan Kamal (2022) menyatakan bahwa akuntabilitas informasi adalah komponen penting dalam menilai transparansi pelayanan publik. Informasi yang diberikan pemerintah harus menjelaskan tujuan, jenis pelayanan, dan dampak nyata yang diterima masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahaminya.

Berdasarkan pendapat tersebut, indikator transparansi informasi publik dalam penelitian ini meliputi:

1. Keterbukaan informasi, yaitu menunjukkan sejauh mana pemerintah menyampaikan informasi kegiatan dan kebijakan kepada masyarakat secara terbuka.
2. Kejelasan informasi, yaitu tingkat kemudahan masyarakat dalam memahami informasi yang disampaikan.
3. Kelengkapan informasi, yaitu ketersediaan unsur-unsur penting dalam informasi yang dipublikasikan, seperti tujuan, pelaksanaan, pihak yang terlibat, dan manfaat atau dampak kegiatan.
4. Aksesibilitas informasi, yaitu kemudahan masyarakat dalam memperoleh atau mengakses informasi yang dipublikasikan pemerintah melalui media komunikasi publik.
5. Akuntabilitas informasi, yaitu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menyampaikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Indikator-indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana dokumentasi kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui Instagram Pemerintah Provinsi Lampung merepresentasikan transparansi informasi publik kepada masyarakat.

2.1.4 Transparansi Digital

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam praktik komunikasi dan penyampaian informasi pemerintahan kepada masyarakat. Transparansi digital adalah jenis keterbukaan informasi

publik yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan informasi secara cepat, mudah diakses, dan menjangkau masyarakat luas. Menurut Wulandar, Aprilla, dan Elcaputera (2024), teknologi digital memiliki kemampuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah melalui penyebaran informasi yang lebih terbuka serta mendorong partisipasi publik dalam mengawasi bagaimana pemerintah beroperasi. Sejalan dengan itu, Failany dan Fahriani (2024) mengatakan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan dapat meningkatkan efektivitas penyebaran informasi publik dan kualitas pelayanan pemerintahan.

Dalam praktik pemerintahan saat ini, transparansi digital diwujudkan melalui berbagai platform digital, seperti website resmi pemerintah dan media sosial. Instagram adalah salah satu media sosial yang paling populer karena memungkinkan penyampaian informasi secara visual, interaktif, dan secara real-time. Akibatnya, transparansi digital menjadi alat penting untuk meningkatkan akses publik terhadap informasi, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, dan mendukung komunikasi publik yang efektif.

2.2 Komunikasi Publik

2.2.1 Pengertian Komunikasi Publik

Komunikasi publik adalah proses menyampaikan informasi, pesan, dan gagasan kepada masyarakat luas melalui berbagai media komunikasi. Komunikasi publik dalam pemerintahan digunakan untuk menyampaikan kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah kepada publik untuk meningkatkan pemahaman dan keterbukaan informasi.

Menurut Mucharam (2022), komunikasi publik adalah proses komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara efektif sehingga pesan yang disampaikan dapat dipahami oleh masyarakat. Riana dkk. (2024) menyatakan bahwa tujuan

komunikasi publik adalah untuk memberikan informasi, meningkatkan pemahaman, dan membangun interaksi antara lembaga dengan masyarakat melalui berbagai media komunikasi, termasuk media digital.

Berdasarkan pendapat ini, dapat disimpulkan bahwa komunikasi publik adalah proses penyebaran informasi kepada masyarakat umum dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang informasi dan menciptakan hubungan yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.

2.2.2 Fungsi Komunikasi Publik

Komunikasi publik digunakan dalam pemerintahan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat umum tentang kebijakan, program, pelayanan, dan berbagai kegiatan pemerintah. Melalui komunikasi publik, masyarakat dapat memperoleh informasi yang mereka butuhkan dan juga memperoleh pemahaman tentang berbagai kebijakan dan tindakan pemerintah.

Irawan dkk. (2025) menyatakan bahwa komunikasi publik berfungsi sebagai media untuk menyebarkan informasi tentang pelayanan publik dan untuk membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Sementara itu, Mucharam (2022) menyatakan bahwa komunikasi publik memiliki peran dalam meningkatkan efisiensi penyampaian pesan, meningkatkan pemahaman masyarakat, dan mengurangi kesalahpahaman yang muncul selama proses komunikasi.

Selain itu, komunikasi publik tidak hanya berfungsi sebagai sarana informasi, komunikasi publik juga mendukung keterbukaan dan transparansi informasi publik melalui penggunaan berbagai media komunikasi, termasuk media sosial. Fungsi komunikasi publik meliputi penyebaran informasi, meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun hubungan antara masyarakat dan pemerintah, dan mendukung transparansi informasi publik.

2.2.3 Komunikasi Publik Melalui Media Sosial (Instagram)

Perkembangan teknologi digital ini, media sosial telah menjadi salah satu metode penting untuk berkomunikasi dengan publik. Instagram adalah platform yang sangat digunakan oleh pemerintah karena memungkinkan penyebaran informasi yang cepat, menarik, dan mudah dipahami melalui foto dan video. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan platform ini untuk memungkinkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Instagram mendukung keterbukaan informasi publik, menurut Maulani, Syarah, dan Susilowati (2024), karena memungkinkan penyampaian informasi yang cepat dan mudah diakses. Selain itu, fitur interaktif seperti komentar, tanda suka, dan pesan langsung memungkinkan komunikasi dua arah. Namun, dalam komunikasi publik, penggunaan media sosial harus dilakukan dengan mempertimbangkan etika komunikasi agar informasi yang disampaikan jelas, informatif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Setiawan, Wijayanti, & Yuliatmojo, 2022).

Dalam praktik pemerintahan, Instagram digunakan sebagai media untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pemerintah secara visual. Masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan informasi tentang program, kebijakan, dan aktivitas pemerintah melalui konten yang dipublikasikan. Oleh karena itu, penelitian ini berkonsentrasi pada penggunaan Instagram sebagai media untuk mencatat aktivitas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Lampung serta peranannya dalam mendukung transparansi informasi publik.

2.3 Media Sosial dalam Komunikasi Publik

2.3.1 Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah platform digital berbasis internet yang memungkinkan orang membuat, membagikan, dan berinteraksi dengan data dalam jaringan virtual. Kehadirannya telah mengubah pola

komunikasi masyarakat dengan memungkinkan penyebaran informasi secara cepat, luas, dan dua arah. Dalam konteks pemerintahan, media sosial digunakan sebagai sarana komunikasi publik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat secara lebih efisien dan mudah diakses.

Menurut Maulvi, Rizal, dan Lusiana (2023), media sosial telah mengubah cara pemerintah berkomunikasi humas; mereka telah mengubah cara untuk menyebarkan informasi, mengontrol opini publik, dan menciptakan citra institusi. Media sosial, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mendukung keterbukaan informasi publik dan memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Akun Instagram Pemerintah Provinsi Lampung (@pemprovlampung_) digunakan dalam penelitian ini untuk mencatat kegiatan pimpinan daerah dan memberikan informasi kepada masyarakat.

2.3.2 Karakteristik Media Sosial

Media sosial memiliki karakteristik interaktif, partisipatif, dan berlangsung real-time yang membedakannya dari media komunikasi konvensional. Karakteristik tersebut memungkinkan pengguna tidak hanya dapat menerima informasi tetapi juga dapat memberikan komentar, tanggapan, maupun kritik terhadap informasi yang dipublikasikan.

Media sosial juga memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas tanpa dibatasi waktu atau ruang. Media sosial, menurut Zordi dkk. (2025), telah berkembang menjadi ruang publik digital yang memengaruhi kebijakan pemerintah dan membentuk opini masyarakat. Media sosial, oleh karena itu, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, tetapi juga membantu meningkatkan transparansi informasi publik melalui penyebaran informasi yang mudah diakses, terbuka, dan interaktif.

2.3.3 Fungsi Media Sosial dalam Komunikasi Publik

Media sosial digunakan secara strategis dalam komunikasi publik sebagai sarana untuk informasi, interaksi, edukasi, dan pembentukan opini publik. Dalam konteks pemerintahan, media sosial digunakan untuk secara cepat dan terbuka menyampaikan program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah kepada masyarakat.

Nuranijiwa dan Pranata (2024) menyatakan bahwa media sosial adalah alat yang efektif untuk menyebarkan informasi publik dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat melalui komunikasi terus-menerus. Sehubungan dengan ini, Nugraha dkk. (2024) menyatakan bahwa penggunaan media sosial oleh lembaga pemerintah memungkinkan informasi publik disebarluaskan secara lebih cepat, luas, dan mudah dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat. Selain itu, melalui penyediaan akses informasi yang terbuka, media sosial membantu transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

Oleh karena itu, media sosial dapat membantu komunikasi publik pemerintah dengan cara yang informatif, partisipatif, dan strategis. Dalam penelitian ini, Instagram Pemerintah Provinsi Lampung digunakan sebagai alat untuk menyimpan catatan tentang kegiatan pimpinan daerah dan juga sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat.

2.3.4 Media Sosial dalam Konteks Pemerintahan Digital

Media sosial menjadi bagian penting dari komunikasi pemerintahan dalam era digital karena memungkinkan informasi disampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat, terbuka, dan efisien. Selain itu, penggunaan media sosial memperluas jangkauan komunikasi dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Media sosial, menurut Papani dkk. (2025), adalah alat yang efektif untuk komunikasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan

transparansi informasi melalui penyebaran informasi yang mudah diakses bagi masyarakat. Agustin (2024) menyatakan bahwa Instagram berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat melalui penyampaian informasi dan interaksi yang memungkinkan masyarakat memberikan tanggapan dan aspirasi secara langsung.

Oleh karena itu, pengelolaan media sosial harus dilakukan secara berkelanjutan dengan memprioritaskan konten yang informatif dan tidak hanya acara. Studi ini menggunakan akun Instagram Pemerintah Provinsi Lampung sebagai media komunikasi publik untuk mencatat kegiatan pimpinan daerah dan memberikan informasi kepada masyarakat melalui feed dan reel konten.

2.4 Instagram sebagai Media Komunikasi Publik Pemerintah

2.4.1 Pengertian dan Karakteristik Instagram dalam Komunikasi Publik Pemerintah

Instagram adalah platform media sosial berbasis visual yang memungkinkan pengguna membuat, membagikan, dan berbagi informasi secara interaktif melalui foto, video, dan konten audiovisual. Seiring perkembangan teknologi komunikasi digital, platform ini telah berkembang menjadi platform yang digunakan oleh berbagai lembaga, termasuk pemerintah, untuk berkomunikasi dengan publik secara digital.

Menurut Agustin (2024), Instagram berfungsi sebagai platform e-government yang mendukung penyebaran informasi publik sekaligus memudahkan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan, itu digunakan untuk menyampaikan informasi tentang kebijakan, program, pelayanan publik, dan aktivitas pemerintah secara cepat, terbuka, dan mudah diakses.

Instagram sebagai media komunikasi yang dimiliki oleh pemerintah, memiliki fitur visual, interaktif, dan real-time. Penggunaan foto dan video untuk menyampaikan informasi membuat pesan lebih mudah dipahami dan menarik perhatian masyarakat. Selain itu, pemerintah dan masyarakat dapat berkomunikasi dua arah melalui fitur pesan langsung, komentar, jumlah suka, dan berbagi. Menurut Paramita dan Permatasari (2026), strategi visual dan naratif yang diterapkan pada konten Instagram pemerintah dapat meningkatkan komunikasi, membuat informasi lebih mudah diakses dan lebih komunikatif.

Dengan karakteristik tersebut, Instagram menjadi media strategis dalam komunikasi pemerintah karena fitur-fiturnya, selain menyebarkan informasi, memungkinkan interaksi dan mendukung keterbukaan informasi publik. Dalam penelitian ini, Instagram digunakan sebagai media untuk mendokumentasikan kegiatan pimpinan daerah sekaligus menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2.4.2 Fungsi Instagram dalam Komunikasi Pemerintah

Instagram memiliki peran penting dalam komunikasi publik pemerintah sebagai sarana penyebaran informasi, interaksi, dan pembentukan citra institusi. Melalui konten visual yang menarik, pemerintah dapat menyebarkan informasi tentang kebijakan, program, layanan, dan kegiatan pemerintah secara cepat, luas, dan mudah diakses.

Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media yang menyebarluaskan informasi, tetapi juga menawarkan kesempatan bagi individu untuk berinteraksi satu sama lain melalui fitur seperti jumlah suka, komentar, dan pesan langsung. Masyarakat dapat menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan masukan terhadap informasi yang dipublikasikan melalui interaksi ini. Harun (2025) mengatakan bahwa jumlah orang yang berinteraksi dengan akun media sosial pemerintah merupakan alat

penting untuk mengukur seberapa efektif komunikasi publik karena ini menunjukkan bagaimana masyarakat merespon tindakan pemerintah.

Instagram juga membangun reputasi dan kepercayaan publik. Instagram dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah jika digunakan dengan cara yang komunikatif, informatif, dan sesuai kebutuhan. Menurut Setiawan dan Tirwardhani (2025), Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga membantu interaksi publik dan menciptakan citra positif tentang pemerintah.

2.4.3 Instagram sebagai Media Dokumentasi Kegiatan Pimpinan

Instagram digunakan dalam praktik komunikasi publik pemerintah untuk mendokumentasikan kegiatan pemimpin daerah, seperti gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah. Dokumentasi ini dipublikasikan melalui konten visual, yang berfungsi sebagai arsip kegiatan pemerintahan sekaligus sarana untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

Zulfa (2025) mengatakan bahwa Instagram memungkinkan informasi pemerintah disampaikan secara lebih komunikatif melalui foto dan video, sehingga mendukung keterbukaan informasi publik. Abidin, Soegiarto, dan Masyarakat (2021) mengatakan bahwa pemerintah menggunakan Instagram untuk mempublikasikan kegiatan protokol dan aktivitas pemerintahan lainnya untuk berkomunikasi dengan masyarakat dan menciptakan citra digital institusi.

Proses dokumentasi kegiatan pimpinan mencakup peliputan, dokumentasi visual, pengemasan konten, dan publikasi melalui fitur *feed* dan *reel*. Proses ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi mengenai aktivitas pemerintah daerah secara cepat dan mudah.

Namun demikian, pemanfaatan Instagram sebagai media dokumentasi masih menghadapi tantangan karena sebagian konten cenderung bersifat seremonial. Oleh karena itu, dokumentasi kegiatan pimpinan harus

menampilkan tidak hanya aktivitas pemerintahan tetapi juga informasi yang jelas, informatif, dan dapat dipahami masyarakat sebagai bagian dari transparansi publik.

2.5 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan

2.5.1 Pengertian Dokumentasi dalam Konteks Pemerintahan

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyajian informasi dalam bentuk data, gambar, maupun audiovisual. Dalam pemerintahan, dokumentasi berfungsi sebagai arsip administratif dan juga sebagai sumber informasi publik yang menunjukkan tindakan dan operasi pemerintah kepada masyarakat.

Sugiarto (2021) menyatakan bahwa dokumentasi adalah bagian dari sistem informasi organisasi karena berfungsi sebagai alat pencatatan dan penyedia informasi yang dapat digunakan kembali untuk kebutuhan internal maupun eksternal. Praktik dokumentasi pemerintahan melalui media sosial berkembang bersama dengan kemajuan teknologi digital, yang memungkinkan penyebaran informasi kepada masyarakat secara lebih cepat, terbuka, dan mudah diakses.

Dalam penelitian ini, dokumentasi didefinisikan sebagai proses penyebaran informasi mengenai kegiatan pimpinan daerah melalui akun Instagram Pemerintah Provinsi Lampung sebagai sarana komunikasi publik dan transparansi informasi.

2.5.2 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan sebagai Komunikasi Publik

Dokumentasi kegiatan pimpinan merupakan bagian dari komunikasi publik pemerintah yang menyampaikan informasi tentang berbagai aktivitas penyelenggaraan pemerintah kepada masyarakat. Dokumentasi ini mencakup kegiatan pimpinan daerah seperti kunjungan kerja, rapat koordinasi, peresmian program, dan kegiatan pelayanan publik lainnya.

Dokumentasi pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga berfungsi sebagai sumber informasi yang memungkinkan masyarakat mengetahui bagaimana pemerintah bekerja dan melakukan apa yang mereka lakukan.

Nugraha et al. (2024) menyatakan bahwa dokumentasi kegiatan pemerintah di media komunikasi pemerintah berperan dalam penyebaran informasi kelembagaan secara cepat dan efektif. Sejalan dengan itu, Maulani et al. (2024) menyatakan bahwa penyebaran informasi publik melalui media sosial dapat meningkatkan keterbukaan informasi dan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang kegiatan pemerintah. Dengan demikian, dokumentasi tidak hanya menjadi rekaman aktivitas pemerintahan, tetapi juga merupakan bagian dari komunikasi publik yang membantu menyebarkan informasi secara terbuka kepada masyarakat.

2.5.3 Proses Dokumentasi Kegiatan Pimpinan

Dalam praktik komunikasi publik digital, dokumentasi kegiatan pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan dilakukan dengan cara yang sistematis dan terorganisir. Menurut Wina et al. (2025), dokumentasi kegiatan pemerintah daerah meliputi tiga tahapan utama, yaitu pengambilan data (peliputan), pengolahan hasil (pengemasan konten), dan penyebarluasan informasi (publikasi).

a. Tahap peliputan: tahap ini adalah proses pengumpulan data, termasuk informasi dan foto serta video, tentang kegiatan pimpinan daerah. Tahap ini sangat penting karena menentukan kualitas dokumentasi yang akan didistribusikan kepada masyarakat sehingga informasi yang diperoleh harus akurat, valid, dan relevan dengan kegiatan yang berlangsung.

b. Tahap pengemasan konten: tahap ini adalah proses mengubah dan menyusun informasi menjadi konten yang menarik, komunikatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Paramita dan Permatasari (2026)

menyatakan bahwa pendekatan visual dan naratif dalam konten Instagram pemerintah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas komunikasi publik.

c. Tahap publikasi: tahap ini merupakan penyebaran konten melalui media komunikasi publik, terutama Instagram. Pada tahap ini, media sosial berfungsi sebagai sarana distribusi informasi yang memungkinkan pemerintah menjangkau masyarakat secara luas, cepat, dan interaktif. Pendapat ini sejalan dengan Maulvi, Rizal, dan Lusiana. (2023) yang menyatakan bahwa media sosial pemerintah berfungsi sebagai media dokumentasi sekaligus sebagai sarana efektif dalam penyebaran informasi publik.

2.5.4 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan sebagai Media Informasi Publik

Salah satu media informasi publik yang digunakan pemerintah untuk menyampaikan berbagai kegiatan, program, dan kebijakan kepada masyarakat umum adalah dokumentasi kegiatan pimpinan. Dokumentasi ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan tugasnya, sehingga mereka dapat lebih mudah memahami aktivitas dan kinerja pemerintah.

Nugraha et al. (2024) menyatakan bahwa dokumentasi kegiatan yang dipublikasikan di media pemerintah berkontribusi pada penyebaran informasi kelembagaan secara luas dan efektif. Sejalan dengan itu, Maulani et al. (2024) menyatakan bahwa penyebaran informasi melalui media sosial pemerintah dapat meningkatkan keterbukaan informasi publik dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi tentang kegiatan pemerintah. Oleh karena itu, dokumentasi kegiatan pimpinan tidak menjadi hambatan untuk penyebaran informasi kepada masyarakat.

2.5.5 Dokumentasi Kegiatan Pimpinan dalam Transparansi Informasi Publik

Dokumentasi kegiatan pimpinan merupakan bagian penting dari transparansi informasi publik karena memiliki fungsi sebagai sarana penyebaran informasi pemerintah kepada masyarakat. Publikasi di media sosial tidak hanya menampilkan aktivitas pemerintah, tetapi juga menunjukkan program, kebijakan, dan kegiatan pemerintah daerah lebih terbuka dan mudah diakses bagi masyarakat.

Dalam perspektif komunikasi publik digital, dokumentasi kegiatan pimpinan adalah metode transparansi yang dilakukan melalui penyebaran informasi secara real-time. Media sosial memungkinkan pemerintah menyebarkan informasi tanpa batasan ruang dan waktu, sehingga berfungsi sebagai media komunikasi yang mendukung keterbukaan informasi publik.

Namun, transparansi tidak hanya ditentukan oleh kuantitas informasi yang dipublikasikan, tetapi juga kualitas dan keakuratan informasi yang disampaikan. Setiawan dan Triwardhani (2025) menyatakan bahwa transparansi informasi melalui media sosial dapat meningkatkan kepercayaan publik apabila informasi disajikan secara jelas, relevan, dan komunikatif. Dengan demikian, Maulani dkk. (2024) menyatakan bahwa Instagram dapat membantu masyarakat memahami inisiatif dan kebijakan pemerintah melalui penyebaran informasi kontekstual dan mudah dipahami. Selain itu, Nugraha dkk. (2024) menegaskan bahwa dokumentasi kegiatan di media sosial memiliki peran penting dalam penyebaran informasi kelembagaan kepada masyarakat.

Dengan demikian, dokumentasi kegiatan pimpinan tidak secara otomatis menciptakan transparansi informasi publik. Transparansi hanya dapat dicapai melalui pengelolaan yang strategis melalui penyebaran informasi yang informatif, relevan, mudah dipahami, dan memiliki konteks yang jelas dan lengkap. Oleh karena itu, dokumentasi kegiatan pimpinan dapat

menjadi alat yang efektif untuk mendukung transparansi informasi publik di era digital.

2.6 Pendekatan POAC

2.6.1 Pengertian POAC

Pendekatan manajemen yang sistematis diperlukan agar kegiatan organisasi maupun pemerintahan dapat berjalan efektif dan terarah. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah POAC (Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling) yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan kegiatan organisasi secara terstruktur.

Menurut George R. Terry, manajemen merupakan proses yang terdiri atas fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Keempat fungsi tersebut menjadi landasan dalam mengelola serta mengevaluasi berbagai aktivitas organisasi.

Samudra (2026) menjelaskan bahwa POAC merupakan pendekatan manajemen yang mengatur alur kerja organisasi melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan secara berkelanjutan. Sementara itu, Muhamad dkk. (2024) menyatakan bahwa POAC digunakan untuk meningkatkan efektivitas kegiatan organisasi melalui pengelolaan yang terstruktur dan saling terintegrasi.

Dalam penelitian ini, POAC digunakan untuk melihat bagaimana kegiatan pimpinan daerah di Instagram Pemerintah Provinsi Lampung didokumentasikan. Proses ini mencakup hal-hal seperti perencanaan konten, pengorganisasian tim dokumentasi, pelaksanaan peliputan dan publikasi, dan pengawasan hasil konten yang dipublikasikan.

2.6.2 Planning (Perencanaan)

Planning atau perencanaan adalah fungsi awal dalam manajemen yang mencakup penetapan tujuan, penyusunan strategi, dan penentuan langkah kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut konsep POAC yang dikemukakan George R. Terry, perencanaan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan karena menentukan arah, sasaran, dan standar kerja organisasi.

Samudra (2026) menyatakan bahwa fungsi planning berfungsi untuk menyusun langkah-langkah kerja secara sistematis agar kegiatan dapat berjalan efektif dan terarah. Selain itu, Muhamad dkk. (2024) menyatakan bahwa perencanaan merupakan bagian penting dari manajemen karena menjadi pedoman untuk pelaksanaan dan pengawasan operasi organisasi.

Dalam dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, tahap perencanaan termasuk menyusun agenda publikasi, menentukan ide tentang konten, pesan utama, dan format penyampaian informasi seperti foto atau video. Perencanaan juga mencakup strategi penyampaian informasi agar konten yang dipublikasikan tidak hanya bersifat dokumentatif, tetapi juga informatif, komunikatif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Maulvi, Rizal, dan Lusiana (2023) menyatakan bahwa perencanaan konten, termasuk penentuan pesan, waktu publikasi, dan metode penyebaran informasi, berpengaruh terhadap efektivitas komunikasi publik pemerintah di media sosial. Oleh karena itu, proses perencanaan sangat penting untuk menyusun catatan tentang tindakan pimpinan yang mendukung transparansi informasi publik.

2.6.3 Organizing

Organizing atau pengorganisasian, adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan pengaturan sumber daya, pembagian tugas, dan koordinasi kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konsep

POAC, pengorganisasian dilakukan agar setiap orang memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya.

Samudra (2026) mengatakan pengorganisasian adalah proses pengelolaan sumber daya dengan membagi tugas dan mengatur tugas secara sistematis agar tugas dapat dilakukan dengan efektif. Selain itu, Muhamad dkk. (2024) mengatakan bahwa pengorganisasian berperan dalam membangun koordinasi kerja yang terstruktur untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal.

Tahap ini dalam dokumentasi kegiatan pimpinan daerah melibatkan pembagian tanggung jawab tim dokumentasi agar proses peliputan, pengolahan, dan publikasi informasi sesuai dengan kebutuhan informasi publik. Dalam penggunaan media digital pemerintahan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas, Wulandar, Aprilla, dan Elcaputera (2024) menyatakan bahwa pengelolaan informasi yang terstruktur diperlukan. Oleh karena itu, pengorganisasian menjadi tahapan penting dalam pengelolaan dokumentasi kegiatan pimpinan sebagai bagian dari komunikasi publik pemerintah.

2.6.4 Actuating (Pelaksanaan)

Actuating atau pelaksanaan adalah fungsi manajemen yang berkaitan dengan melaksanakan rencana melalui pengarahan, koordinasi, dan penggerakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi. Muhamad dkk. (2024) menyatakan bahwa fungsi ini bertujuan mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi agar bekerja secara efektif, sedangkan Samudra (2026) menjelaskan bahwa tahap pelaksanaan menjadi wujud nyata dari perencanaan yang telah disusun.

Tahap pelaksanaan dalam dokumentasi kegiatan pimpinan daerah mencakup peliputan kegiatan, pengambilan foto dan video, pengolahan konten, dan publikasi informasi melalui Instagram pemerintah. Tim dokumentasi melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan pembagian

kerja yang telah ditetapkan agar informasi tentang kegiatan pimpinan dapat disampaikan secara cepat dan informatif kepada masyarakat.

Menurut Failany dan Fahriani (2024), penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan membantu penyebaran informasi publik menjadi lebih cepat, jelas, dan mudah diakses. Oleh karena itu, *actuating* menjadi tahapan penting dalam pelaksanaan dokumentasi kegiatan pimpinan sebagai upaya mendukung transparansi informasi publik melalui media sosial pemerintah.

2.6.5 Controlling (Pengawasan)

Controlling atau pengawasan adalah fungsi manajemen yang berfokus pada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar berjalan sesuai dengan tujuan, rencana, dan standar yang telah ditetapkan. Menurut Samudra (2026), pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi terlaksana sesuai dengan perencanaan, sedangkan Muhamad dkk. (2024) menyatakan bahwa fungsi ini berperan dalam menilai keberhasilan kegiatan dan menjadi dasar untuk perbaikan organisasi

Dalam dokumentasi kegiatan pimpinan daerah, pengawasan dilakukan terhadap kualitas konten yang dipublikasikan melalui Instagram, meliputi kejelasan informasi, kualitas visual, konsistensi publikasi, serta respons masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Seperti yang dinyatakan oleh Setiawan dan Triwardhani (2025), pengelolaan media sosial pemerintah yang komunikatif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik. Dengan demikian, dalam penelitian ini controlling dipahami sebagai proses pengawasan dan evaluasi dokumentasi kegiatan pimpinan daerah pada akun Instagram Pemerintah Provinsi Lampung guna memastikan informasi yang dipublikasikan mampu mendukung transparansi informasi publik secara jelas dan informatif.

BAB III

GAMBARAN UMUM

3.1 Gambaran Umum Instansi

3.1.1 Sejarah Pemerintah Provinsi Lampung

Provinsi Lampung merupakan provinsi yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatra dan dikenal sebagai "Gerbang Sumatra" karena posisinya yang strategis sebagai penghubung antara Pulau Sumatra dan Pulau Jawa. Provinsi ini berbatasan dengan Provinsi Sumatra Selatan dan Bengkulu di sebelah utara serta Selat Sunda di sebelah selatan. Ibu kota Provinsi Lampung adalah Bandar Lampung yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian daerah. Dengan luas wilayah sekitar 35.376 km², Lampung memiliki kondisi geografis yang beragam, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan, serta dikenal memiliki potensi alam dan budaya yang kaya.

Provinsi Lampung memiliki keberagaman budaya yang dipengaruhi oleh berbagai suku, seperti Lampung, Jawa, Sunda, dan Bali. Kekayaan budaya daerah ini tercermin dalam adat istiadat, kesenian tradisional, serta warisan budaya seperti kain tapis dan upacara adat yang masih dilestarikan hingga saat ini. Secara administratif, Provinsi Lampung resmi berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964. Sebelum menjadi provinsi, Lampung merupakan bagian dari Karesidenan Lampung yang berada di bawah Provinsi Sumatra Selatan. Meskipun demikian, Lampung telah lama memiliki identitas budaya dan potensi wilayah yang khas, bahkan sejak masa kolonial menjadi salah satu daerah yang memiliki nilai strategis dan ekonomi penting di Pulau Sumatra.

Pada masa Kesultanan Banten, Lampung merupakan daerah penting penghasil lada yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Ketika terjadi konflik antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji, VOC

memanfaatkan situasi tersebut untuk memperluas pengaruhnya. Sebagai imbalan atas bantuan VOC dalam memperoleh kekuasaan, Sultan Haji menyerahkan hak pengawasan perdagangan Lampung kepada VOC melalui perjanjian pada tahun 1682. Sejak saat itu VOC mulai berupaya menguasai perdagangan lada di Lampung. Namun, upaya tersebut tidak sepenuhnya berhasil karena sebagian penguasa lokal Lampung masih setia kepada Sultan Ageng Tirtayasa dan menolak dominasi VOC di wilayah tersebut.

Dalam perkembangannya, VOC mengetahui bahwa kekuasaan Kesultanan Banten di Lampung tidak bersifat mutlak. Perwakilan Banten di Lampung yang dikenal sebagai jenang atau gubernur hanya berperan dalam mengelola kepentingan perdagangan, khususnya komoditas lada. Sementara itu, pemerintahan lokal tetap dijalankan oleh para pemimpin adat setempat yang memiliki otonomi di wilayahnya masing-masing. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara Banten dan Lampung lebih didasarkan pada kepentingan ekonomi dan perdagangan daripada penguasaan politik secara langsung.

Pada masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles, Lampung sempat berada di bawah pengaruh Inggris karena dianggap bukan wilayah jajahan Belanda. Setelah pemerintahan Inggris berakhir, Belanda kembali memperkuat kekuasaannya di Lampung dengan menempatkan seorang residen pada tahun 1829. Pada periode tersebut, pengaruh Radin Inten I semakin kuat sehingga Belanda berupaya membatasi kekuasaannya melalui berbagai perjanjian. Namun, Radin Inten tetap melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Upaya Belanda untuk menangkapnya tidak berhasil, bahkan menimbulkan kerugian bagi pihak Belanda. Setelah wafat pada tahun 1825, perjuangan Radin Inten dilanjutkan oleh putranya, Radin Imba Kusuma.

Setelah berakhirnya Perang Diponegoro, Belanda kembali memusatkan perhatian pada perlawanan di Lampung yang dipimpin oleh Radin Imba Kusuma. Berbagai upaya penyerangan dilakukan hingga akhirnya pada

tahun 1834 Belanda berhasil menguasai benteng pertahanannya. Radin Imba Kusuma kemudian melarikan diri ke wilayah Lingga, tetapi berhasil ditangkap oleh penduduk setempat dan diserahkan kepada Belanda. Setelah ditangkap, ia diasingkan ke Pulau Timor.

Perlawanan masyarakat Lampung terhadap pemerintahan kolonial Belanda terus berlanjut meskipun berbagai upaya pendekatan telah dilakukan. Salah satu tokoh yang memimpin perlawanan tersebut adalah Radin Inten II, putra Radin Imba Kusuma. Setelah berhasil menangkap dan membunuh Radin Inten II, Belanda semakin memperkuat kekuasaannya di Lampung. Pada masa kolonial, berbagai sektor perkebunan seperti kopi, karet, tembakau, dan kelapa sawit mulai dikembangkan, didukung oleh pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalur kereta api Telukbetung–Palembang pada tahun 1913. Setelah melalui masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, Karesidenan Lampung akhirnya ditetapkan sebagai provinsi tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 pada tanggal 18 Maret 1964.

3.1.2 Logo Pemerintah Provinsi Lampung



Gambar 1. Logo Pemerintah Provinsi Lampung

Arti Logo Pemerintah Provinsi Lampung

a. Bingkai Perisai Bersegi Lima

Perisai bersegi lima adalah menggambarkan tentang kesanggupan untuk mempertahankan dan menjalankan cita-cita dan tujuan membangun daerah Lampung untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

b. Kata Lampung

Kata Lampung itu sendiri merupakan sebuah penegasan untuk menunjukkan identitas pemilik lambang Lampung tersebut.

c. Warna

Lambang Lampung sendiri terdiri dari berbagai perpaduan warna yang memiliki arti dan makna:

1. Warna hijau, artinya melambangkan dataran yang tinggi dan subur untuk menanam tanaman keras dan tanaman musiman.
2. Warna coklat, artinya melambangkan pada dataran rendah yang subur untuk ditanami sawah dan ladang.
3. Warna biru, artinya melambangkan kekayaan sungai dan lautan yang merupakan sumber dari perikanan dan kehidupan para nelayan di Lampung.
4. Warna putih, artinya melambangkan kesucian hati dan keikhlasan hati masyarakat Lampung.
5. Warna kuning (tua, emas, dan muda), artinya melambangkan sebuah keagungan dan kejayaan dan kebesaran cita-cita masyarakat Lampung untuk membangun daerah dan negaranya.

d. Payung Jurai

Payung jurai berwarna kuning melambangkan Provinsi Lampung sebagai tempat bernaung masyarakat serta simbol kesetiaan kepada NKRI. Tiang dan bulatan pada puncaknya melambangkan persatuan cita-cita dan semangat masyarakat Lampung dalam membangun bangsa dan negara dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa.

e. Siger

Siger merupakan sebuah mahkota yang menjadi lambang keagungan pada adat budaya dan tingkat kehidupan masyarakat Lampung yang terhormat.

f. Gong

Gong merupakan sebuah alat musik yang menjadi seni budaya Lampung yang melambangkan sebuah kehidupan yang demokratis sesuai dengan fungsi pada gong.

g. Laduk dan Payan

Laduk merupakan senjata tradisional berbentuk golok yang memiliki fungsi serbaguna dan payan merupakan senjata tradisional berbentuk tombak dan senjata pusaka tradisional Lampung merupakan nama 2 senjata tradisional Lampung yang melambangkan identitas daerah Lampung.

h. Daun dan Buah Lada

Lada merupakan produk lokal utama penduduk asli Lampung sehingga Lampung dapat dikenal bangsa-bangsa asia dan bangsa barat. Biji lada berjumlah 64, menunjukkan bahwa Lampung terbentuk dari tahun 1964. Daun berjumlah 17 dan lada berjumlah 8 yang merupakan hari dan bulan kemerdekaan Indonesia 17 agustus.

i. Setangkai Padi

Padi adalah produk utama penduduk migrasi di Lampung sehingga terjadilah kehidupan bersama dan saling mengisi antara 2 unsur golongan masyarakat yang secara harmonis. Butir padi berjumlah 45 yang merupakan tahun kemerdekaan RI, yaitu 1945.

j. Aksara Lampung “Lampung”

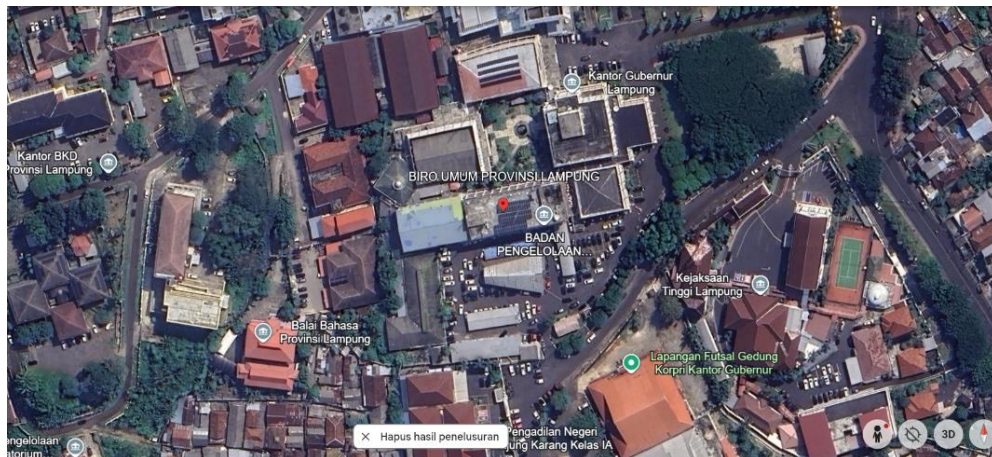
Aksara merupakan sebagai penegasan identitas Lampung hanya saja berbentuk tulisan daerah lampung.

k. Pita Sai Bumi Ruwai Jurai

Sai Bumi Ruwai Jurai adalah semboyan masyarakat Lampung yang memiliki makna, yakni Sang Bumi merupakan rumah tangga yang agung dan Ruwai Jurai adalah dua kelompok masyarakat adat pepadun dan adat sai batin.

3.1.3 Lokasi Praktik Kerja Lapangan

Lokasi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung beralamat di Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 69 Telukbetung, Bandar Lampung. Kode Pos 35215.



Gambar 2. Lokasi Biro Administrasi Pimpinan Daerah Provinsi Lampung

3.1.4 Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Lampung

Visi:

“Bersama Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Misi:

3 misi yang disebut dengan “tiga cita” merupakan program kerja gubernur dan wakil gubernur periode 2025 - 2030:

a. Tiga cita 1

Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Mandiri, Dan Inovatif

- Mendorong investasi dan hilirisasi industri
- Lampung menjadi lumbung pangan nasional
- Mewujudkan ekosistem ekonomi berbasis desa
- Pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai daya ungkit ekonomi daerah
- Inisiasi lumbung energi terbarukan
- Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur berkelanjutan

b. Tiga cita 2

Memperkuat Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Produktif

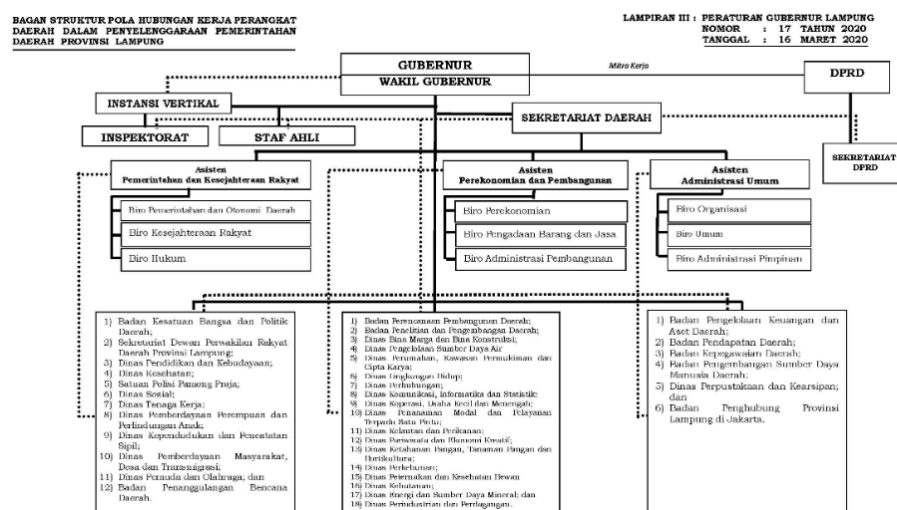
- Generasi cerdas, berakhlak dan berbudaya
- Pengusaha muda berdaya saing dan inovatif
- Mendukung prestasi pemuda dan olahraga
- Menuju zero stunting dan perwujudan masyarakat sehat
- Lampung pusat teknologi terpadu

c. Tiga cita 3

Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, Dan Berkelanjutan

- Membangun semangat lampung bersama
- Pengentasan kemiskinan tepat waktu dan tepat sasaran
- Penguatan ketahanan keluarga
- Peningkatan kualitas lingkungan hidup
- Mewujudkan birokrasi berintegritas
- Melanjutkan pembangunan kotabaru “bandar negara” berbasis eco city
- Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang
- Disabilitas, lansia, dan kelompok terlanjar.

3.1.5 Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung



Gambar 3. Struktur Organisasi Pemerintah Provinsi Lampung

3.2 Gambaran Sub Instansi

3.2.1 Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah. Biro Administrasi Pimpinan merupakan unsur staf di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi Umum. Biro ini bertugas mendukung pelaksanaan tugas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah melalui pelayanan administrasi, penyusunan materi pimpinan, kegiatan keprotokolan, serta pengelolaan komunikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Biro Administrasi Pimpinan terdiri atas beberapa bagian yang memiliki tanggung jawab sesuai bidang kerja masing-masing guna mendukung efektivitas pelaksanaan kegiatan pimpinan daerah. Adapun bagian-bagian yang terdapat di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung meliputi:

A. Bagian Protokol

Bagian Protokol bertugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, perencanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan keprotokolan guna mendukung pelaksanaan tugas pimpinan daerah. Tugasnya meliputi pengaturan acara pimpinan, penerimaan tamu VIP/VVIP, pelayanan keprotokolan, serta koordinasi dengan berbagai instansi terkait.

Bagian Protokol terdiri atas tiga sub bagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Acara, yang bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan acara pimpinan, termasuk pengaturan tata tempat, perlengkapan acara, penyusunan susunan acara, pelaksanaan gladi, serta koordinasi dengan pihak terkait.
- b. Sub Bagian Pelayanan Tamu, yang bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan pelayanan tamu pemerintah daerah, meliputi

penerimaan tamu, penyusunan agenda kunjungan, akomodasi, transportasi, serta pelaporan kegiatan kunjungan.

- c. Sub Bagian Hubungan Keprotokolan, yang bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keprotokolan, penyusunan susunan acara pimpinan, pelaksanaan upacara resmi dan kenegaraan, serta koordinasi dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya.

B. Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan

Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan bertugas menyiapkan materi pimpinan, melaksanakan komunikasi pimpinan, serta mengelola rilis dan dokumentasi kegiatan pimpinan daerah.

Bagian ini terdiri atas beberapa subbagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Penyiapan Materi Pimpinan, yang bertugas mengelola administrasi perkantoran, kearsipan, kepegawaian, keuangan, penyusunan laporan, serta mendukung pelaksanaan program dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan biro.
- b. Sub Bagian Komunikasi Pimpinan, yang bertugas melaksanakan fasilitasi, koordinasi, dan dukungan komunikasi pimpinan, termasuk penyediaan bahan koordinasi serta penyusunan laporan kegiatan komunikasi pimpinan.
- c. Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan, yang bertugas melaksanakan peliputan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan publikasi dokumentasi kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dalam bentuk foto maupun video sebagai arsip dan media informasi kegiatan pemerintahan daerah.

C. Bagian Tata Usaha Pimpinan

Bagian Tata Usaha Pimpinan bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi yang mendukung kegiatan pimpinan daerah, meliputi

tata usaha, fasilitasi pimpinan, dan administrasi surat menyurat di lingkungan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

Bagian ini terdiri atas beberapa subbagian, yaitu:

- a. Sub Bagian Tata Usaha, yang bertugas mengelola administrasi umum, penyusunan program kerja, perencanaan, pelaporan, evaluasi kegiatan biro, serta administrasi kepegawaian dan keuangan.
- b. Sub Bagian Fasilitas Pimpinan, yang bertugas menyiapkan dan mengoordinasikan sarana, prasarana, serta berbagai fasilitas yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pimpinan daerah.
- c. Sub Bagian Administrasi Surat, yang bertugas mengelola administrasi surat dan naskah dinas pimpinan, meliputi verifikasi, distribusi, pencatatan, pengarsipan, serta evaluasi administrasi surat Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah.

3.2.2 Visi Misi Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

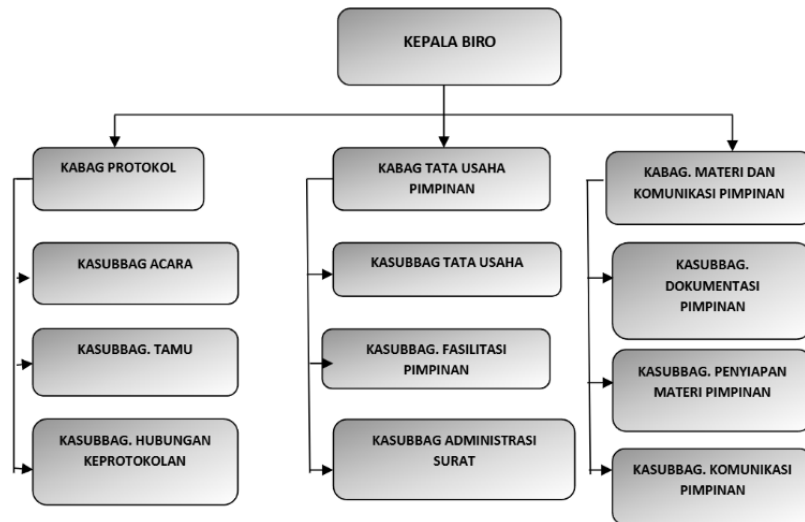
Visi:

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas”

Misi:

- a. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan inovatif.
- b. Memperkuat sumber daya manusia yang unggul dan produktif.
- c. Meningkatkan kehidupan masyarakat beradab, berkeadilan, dan berkelanjutan.

3.2.3 Struktur Organisasi Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung



Gambar 4. Struktur Organisasi Biro Adpim Setda Pemprov Lampung

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Dokumentasi Kegiatan Pimpinan Daerah (Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah) di Instagram sebagai Media Transparansi Informasi Pemerintah Provinsi Lampung”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses dokumentasi kegiatan pimpinan daerah Pemerintah Provinsi Lampung telah dilakukan secara sistematis dan terstruktur sebagai bagian dari komunikasi publik pemerintah. Proses dokumentasi dimulai dari identifikasi dan pemilihan kegiatan pimpinan daerah, peliputan kegiatan, pengelolaan konten, peninjauan informasi, hingga publikasi melalui fitur *feed* dan *reels* pada akun Instagram Pemerintah Provinsi Lampung (@pemprovlampung_). Dokumentasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan pengarsipan, tetapi telah berkembang menjadi sarana penyampaian informasi publik yang lebih terbuka, cepat, dan mudah diakses. Melalui pemanfaatan caption informasi, visual, serta fitur media sosial, Instagram digunakan sebagai media komunikasi publik digital untuk menyampaikan berbagai informasi tentang dan kinerja pemerintah daerah.
2. Respons masyarakat terhadap dokumentasi kegiatan pimpinan daerah yang dipublikasikan melalui Instagram menunjukkan ada keterlibatan publik dalam mengakses dan menanggapi informasi yang disampaikan pemerintah. Respons tersebut terlihat melalui jumlah suka, komentar, tayangan, dan pembagian konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, kebijakan dan program pemerintah, pelayanan publik, serta isu sosial dan lingkungan memperoleh respons yang lebih tinggi dibandingkan dengan konten kegiatan seremonial. Ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memberikan sikap perhatian lebih terhadap informasi yang berhubungan langsung dengan kebutuhan dan kepentingan publik. Dengan demikian, dokumentasi kegiatan pimpinan daerah melalui Instagram dapat berfungsi

sebagai media transparansi informasi publik dan mendukung komunikasi serta interaksi pemerintah dengan masyarakat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai dokumentasi kegiatan pimpinan daerah di Instagram sebagai media transparansi informasi Pemerintah Provinsi Lampung, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, khususnya bagian Dokumentasi Pimpinan, disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan konten dokumentasi kegiatan pimpinan daerah melalui Instagram dengan memperkuat substansi informasi, menyusun caption yang lebih komunikatif, informatif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta mengoptimalkan penyajian visual yang lebih interaktif. Selain itu, publikasi konten yang berkaitan dengan program pemerintah, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan masalah sosial dan lingkungan perlu diberikan perhatian yang lebih besar karena jenis konten tersebut cenderung menghasilkan respons dan keterlibatan yang tinggi.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada platform Instagram Pemerintah Provinsi Lampung serta menitikberatkan pada analisis isi konten dan respons publik berdasarkan tingkat keterlibatan (*engagement*) media sosial. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan meneliti platform lainnya seperti TikTok, Facebook, Threads, atau YouTube, serta mengkaji aspek lain seperti efektivitas komunikasi publik, tingkat kepercayaan, maupun pengaruh media sosial pemerintah terhadap partisipasi publik sehingga diperoleh hasil penelitian yang komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Irawan, E. P., Minarsi, A., Rianty, E., Halim, B., Putri, R. N. I., & Juansa, A. (2025). Komunikasi pelayanan publik.
- Riana, N., Triany, N. A., Tamtomo, T., Muksin, N. N., Sari, P. A., Gafallo, M. F. Y., ... & Judijanto, L. (2024). Komunikasi Publik: Panduan praktis untuk sukses dalam berkomunikasi.
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71–82.
- Maulvi, H. R., Rizal, E., & Lusiana, E. (2023). Peran Media Sosial Bagi Humas Pemerintah. *Jurnal Komunikasi*, 14(1), 92–101. <https://doi.org/10.31294/jkom.v14i1.11852>
- Arkarizki, D., Irawati, R. I., & Sukarno, D. (2023). Transparansi Organisasi Dalam Pengelolaan Informasi Publik Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 594. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45111>
- Nurimansjah, R. A., & Kamal, K. (2022). *Journal I La Galigo : Public Administration Journal Ris Akril Nurimansjah*, 2 Kasmad Kamal. 5(April), 21–27. <https://palopopos.fajar.co.id>
- Tri Haryadi, A., & Kata Kunci, A. (2024). Peran Media Sosial dalam Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Administrasi Publik-BerbagiAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0). In *Indonesian Research Journal on Education Web Jurnal Indonesian Research Journal on Education* (Vol. 4).
- Wulandar, M., Aprilla, W., & Elcaputera, A. (2024). *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Melalui Teknologi Digital dan Partisipasi Publik dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(4), 321–334.
- Failany, M. A., & Fahriani, D. (2024). Penerapan teknologi digital dalam mendukung transparansi keuangan pemerintah. *Praktek Kerja Lapang Akuntansi*, 1(1), 1-6.
- Maulani, R. Z., Syarah, M. M., & Susilowati, S. (2024). Peran Komunikasi Publik Melalui Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di BKN RI. *Brand Communication*, 3(4), 365–375. <https://doi.org/10.70704/bc.v3i4.326>

- Agustin, R. S. (2024). Instagram Sebagai Media Komunikasi E-Government dalam Pelayanan Publik dan Pembangunan Pemerintah Kota Madiun. *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial Dan Ilmu Politik*, 1(1), 90–97.
- Raib, M. I. E., Rosadi, S. D., & Cahyadi, A. (2025). Perbandingan penerapan prinsip transparansi antara Indonesia dengan Irlandia dalam hal terjadinya kegagalan perlindungan data pribadi. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(2), 51-71.
- Sari, D. N., Previdayana, K. S., & Djasuli, M. (2022). Implementasi prinsip transparansi dalam kaidah Islam. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis (JEBS)*, 2(1), 911-915.
- Nugraha, D. A., Priandono, T. E., Ainiyyah, N. F., & Ilham, Y. (2025). Analisis isi konten media sosial Instagram pemerintah Indonesia di tingkat kementerian dan lembaga. *Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi Dan Komunikasi*, 42-52.
- Zulfa, N. (2025). *Media Sosial Instagram Sebagai Media Center pada Biro Administrasi Pimpinan @ biroadpim . riau*. 3(1), 45–58.
- Abidin, K. Z., Soegiarto, A., Masyarakat, H., & Jakarta, U. N. (2021). *PEMANFAATAN INSTAGRAM SEBAGAI MEDIA PUBLIKASI*. 12(2).
- Suhendra, S., & Selly Pratiwi, F. (2024). Peran Komunikasi Digital dalam Pembentukan Opini Publik: Studi Kasus Media Sosial. *Iapa Proceedings Conference*, 293. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2024.1059>
- Sidabutar, I. (2024). Peran Media Sosial dalam Pembentukan Opini Publik di Era Digital. *Tugas Mahasiswa Fisipol*, (November 2025).
- Sudhianta, L. E. (2021). Penggunaan media sosial sebagai media komunikasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan*, 10(4), 37–42. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/view/40240%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/download/40240/29485>
- MUHAMAD, F., RAFLI, S., SITI, Z., & HESTI, K. (2024). Implementasi POAC dalam manajemen pendidikan modern. *REFLECTION: ISLAMIC EDUCATION JOURNAL Учредители: Asosiasi Riset Ilmu Manajemen dan Bisnis Indonesia*, 1(4), 26-36.
- Asni, A., Dasalinda, D., & Chairunnisa, D. (2023). Penerapan Fungsi Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating, And Controlling) dalam Layanan Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah. *Ideguru: Jurnal Karya Ilmiah Guru*, 9(1), 357–364. <https://doi.org/10.51169/ideguru.v9i1.840>
- Samudra, J. (2026). ANALISIS PENERAPAN PRESERVASI KURATIF PADA BAHAN PUSTAKA DI PERPUSTAKAAN SMK NEGERI 2 PALEMBANG

MENGGUNAKAN TEORI GEORGE R. TERRY (POAC). *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(04 April), 1455-1462.

DataReportal. 2024. *Digital 2024: Indonesia*. Diakses dari [Digital 2024: Indonesia — DataReportal – Global Digital Insights](#) pada tanggal 19 April 2026.

Ombudsman Republik Indonesia. 2026. *Ombudsman Lampung Terima 229 Laporan Masyarakat Sepanjang 2025*. Diakses dari: [Ombudsman RI](#) pada tanggal 20 April 2026.

[Pemerintah Provinsi Lampung](#). 2026. *Pemprov Lampung Raih Predikat Tertinggi Pelayanan Publik dari Ombudsman RI*. Diakses dari <https://lampungprov.go.id/detail-post/pemprov-lampung-raih-predikat-tertinggi-pelayanan-publik-dari-ombudsman-ri> pada tanggal 20 April 2026.

Pemerintah Provinsi Lampung. 2016. *Keputusan Gubernur Lampung Nomor 225 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Lampung*. Bandar Lampung: Pemerintah Provinsi Lampung. Diakses dari <https://jdih.lampungprov.go.id/product-hukum/provinsi/5849/pejabat-pengelola-informasi-dan-dokumentasi-%28ppid%29-> pada tanggal 22 April 2026.